

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
NOMOR 07 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN RENCANA AKSI KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan tugas dan tanggungjawab Tim Reformasi Birokrasi yaitu menyusun dokumen rencana aksi kegiatan Reformasi Birokrasi di wilayah kerjanya, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor telah menyusun Rencana Aksi Kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2023
b. bahwa Rencana Aksi Kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2023 perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor.

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota

- Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 06 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TAHUN 2023
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Kegiatan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Aksi Kegiatan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023
- KETIGA : Rencana Aksi Kegiatan Tim Reformasi Birokrasi di evaluasi secara berkala agar pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


NOVE ORANCE OEMATAN

RENCANA AKSI KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TAHUN 2023

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Manajemen Perubahan	1 Perencanaan Reformasi Birokrasi	1 Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Alor	SK Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Alor	√														
			2 Pembangunan Komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental	Kegiatan Kick Off/Pembangunan komitmen pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Alor	√														
			3 Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Alor	Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Alor	√														
		2 Pelaksanaan Manajemen Perubahan	1 Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media	Tersedianya media sosialisasi RB di lingkungan kerja yang bisa diakses stakeholder internal dan eksternal		√													
				Pembangunan Kolom RB di Website resmi yang berisikan dokumentasi/pelaporan pelaksanaan RB		√													
			2 Sosialisasi nilai-nilai untuk menegakan integritas penyelenggara Pemilu dan ASN	Menurunnya jumlah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Menurunnya angka pelanggaran disiplin ASN			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	3 Penyelenggaraan Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Alor		Persentase (%) penandatanganan Pakta Integritas baik Anggota dan ASN	√															
			Persentase (%) pelaporan LHKPN	√	√	√													
			Persentase (%) pelaporan LHKASN	√	√	√													
		Dokumen Laporan Penanganan benturan kepentingan berikut dokumentasi (Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan, Bebas Benturan Kepentingan dan Deklarasi pencanangan Zona Integritas Satuan Kerja)															√		
	4 Internalisasi nilai-nilai dasar organisasi dan menciptakan budaya kerja positif di lingkungan KPU Kabupaten Alor	Tersedianya media sosialisasi nilai-nilai dasar organisasi dan budaya kerja positif di lingkungan KPU Kabupaten Alor	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Diterapkannya Budaya Kerja positif yang dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan tugas kegiatan/tugas keseharian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			5	Pembangunan instrumen <i>reward</i> dan <i>punishment</i> yang mendorong motivasi perubahan, terutama yang terkait dengan pelayanan kepada publik	Tersedianya instrumen <i>reward</i> dan <i>punishment</i> di lingkungan KPU Kabupaten Alor					√						√	
				Pembangunan survei kepuasan layanan sebagai indikator perbaikan pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Alor						√						√	
		3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Melakukan Monitoring pelaksanaan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Alor	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan		√			√			√			√	
				2 Melakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Alor melalui Lembar Kerja Evaluasi Unit (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Alor	Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Alor											√	
				Terisinya Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Unit						√						√	
			3	Melakukan Pelaporan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Alor	Tim RB KPU RI menerima pelaporan : a. SK Tim RB, Tim Agen Perubahan, dan Assessor. b. Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Alor c. Lembar Kerja Evaluasi (LKE Unit)	√										√	
				Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Alor, serta pelaksanaan yang sudah ditindaklanjuti dari evaluasi sebelumnya												√	
2	Penguatan Peraturan Perundang-undangan/Regulasi Kebijakan	1	Evaluasi secara berkala produk peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan) yang menjadi kewenangan di lingkungan KPU Kabupaten Alor	Pemetaan Naskah dinas Pengaturan dan penetapan di lingkungan KPU Kabupaten Alor	Adanya data perundang-undangan di lingkungan KPU Kabupaten Alor	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2 Menyempurnakan atau mengubah berbagai peraturan perundang-undangan (Naskah Dinas Pengaturan dan atau penetapan) yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain	Penyusunan Revisi naskah dinas pengaturan atau penetapan di lingkungan KPU Kabupaten Alor	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang sudah di Revisi							√						√
		3 Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang di pandang menghambat pelayanan	Penyusunan Revisi naskah dinas pengaturan atau penetapan di lingkungan unit dan satuan kerja yang terkait dengan pelayanan kepada stakeholder	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang terkait dengan pelayanan kepada stakeholder yang sudah di revisi							√						√
		4 Merumuskan berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang diperlukan	Penyusunan naskah dinas pengaturan dan atau naskah dinas penetapan yang diperlukan sesuai kebutuhan dan wewenang di lingkungan KPU Kabupaten Alor	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang sudah disahkan.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		5 Pengelolaan JDIH	1 Pembangunan JDIH KPU Kabupaten Alor	Dapat Diaksesnya JDIH KPU Kabupaten Alor	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			2 Pengelolaan JDIH KPU Kabupaten Alor	Updatenya data JDIH KPU Kabupaten Alor		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Penataan Organisasi/Kel embagaan	1 Evaluasi Organisasi	1 FGD Evaluasi Organisasi di lingkungan KPU Kabupaten Alor	Dokumentasi FGD Evaluasi organisasi													√
			2 Pengisian Kuisisioner Evaluasi Organisasi	Pelaporan Kuisisioner Evaluasi Organisasi													
		2 Penyesuaian SOTK	1 Dilaksanakan penyesuaian SOTK di Lingkungan KPU Kabupaten Alor sesuai mandat	SOTK di Lingkungan KPU Kabupaten Alor sesuai mandat		√											

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
			2	Pembuatan Dokumen Struktur Organisasi KPU Kabupaten Alor	Struktur Organisasi KPU Kabupaten Alor	√																	
4	Penataan Tata Laksana	1	1	Penyusunan peta proses bisnis dan SOP	Seluruh peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis	√																	
					Tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi	√																	
					Peta proses bisnis telah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi	√																	
					Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja	√																	
			2	2	Evaluasi proses bisnis	Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh peta proses bisnis yang telah sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi														√			
			3	3	Penyusunan SOP di lingkungan KPU Kabupaten Alor	Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
			Seluruh Peta Proses Bisnis telah dijabarkan dalam SOP				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
			SOP sudah dilegalkan				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
			Seluruh Prosedur Operasional tetap (SOP) telah diterapkan				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
			4	4	Evaluasi SOP	Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti															√		
		2	Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	1	1	Tata kelola PPID di lingkungan KPU Kabupaten Alor	Adanya kebijakan pendukung PID	√	√														
							Dapat diaksesnya Maklumat Layanan, Standar Pelayanan dan SOP terkait permohonan informasi oleh stakeholder	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
							Meningkatnya kepuasan layanan PID																√
							Jumlah permohonan masuk, sedang di proses dan sudah selesai ditindak lanjuti	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
Jumlah sengketa informasi																					√		
Adanya rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID																						√	

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				Indeks Kepuasan Permohon informasi													√				
		3	Tata kelola implementasi Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan KPU Kabupaten Alor	1	Tata Kelola SPBE di lingkungan KPU Kabupaten Alor	Jumlah aplikasi terintegrasi di lingkungan KPU Kabupaten Alor	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
							Jumlah aplikasi berbagai pakai yang dimanfaatkan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
				2	Pemanfaatan Aplikasi SPBE administrasi kesekretariatan: 1). Aplikasi tata naskah dinas 2). Aplikasi Manajemen Kepegawaian 3). Data Pemanfaatan aplikasi Manajemen Kepegawaian 4). Aplikasi Perencanaan 5). Aplikasi Penganggaran 6). Aplikasi Keuangan 7). Aplikasi Manajemen Kinerja Aplikasi Pengadaan	Jumlah dan jenis Naskah Dinas yang sudah dimanfaatkan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
								Terisinya data aplikasi (Manajemen Perencanaan, Penganggaran, Manajemen Keuangan, Manajemen Kinerja)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
								% Pengadaan melalui aplikasi pengadaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
						3	Pemanfaatan aplikasi SPBE pelayanan publik: 1. Layanan pengaduan Publik 2. Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum 3. Layanan Whistle Blowing System (WBS) 4. Layanan Kepemiluan 5. Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	1.	Dapat diaksenya aplikasi pengaduan oleh publik, SOP dan jumlah pengadu/laporan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
										4.	Aplikasi Dokumentasi Informasi Hukum di lingkungan KPU Kabupaten Alor (JDIH Sekretariat) yang selalu diperbaharui										√
											Dapat diaksenya WBS oleh stakeholder, SOP dan jumlah pelapor/laporan pengaduan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
									Jumlah aplikasi Kepemiluan yang dimanfaatkan, serta : Data pengunjung bagi aplikasi yang bisa diakses publik - Indeks Survey Kepuasan Publik terhadap aplikasi											√	
							Jumlah Pemohon melalui PPID KPU Kabupaten Alor Oleh Publik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
		4	Penerapan Sistem Kearsipan yang handal	1	Penerapan sistem arsip	Terkelolahnya arsip statis, dimanis, manual dan digital di lingkungan KPU Kabupaten Alor	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
						2	Kerjasama dengan arsip daerah	Terdokumentasinya arsip vital	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
						3	Pembangunan JF Arsiparis di lingkungan KPU Kabupaten Alor	Jumlah Pemangku Jabatan yang berstatus JF Arsiparis	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
5	Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	1	Pembangunan Sistem Merit	1	Penerapan Pengukuran Kinerja Individu	Seluruh pegawai memiliki Sasaran Kinerja Pegawai							√				√				
						Seluruh Pegawai memahami indikator keberhasilan dari tugas dan jabatan							√					√			

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Sasaran Kinerja Pegawai mendukung Sasaran Strategis dan pencapaian kinerja secara berjenjang/Cascading							√					√	
				Pengukuran periodik Sasaran Kinerja Individu							√					√	
				Adanya Evaluasi dan pelaksanaan hasil evaluasi SKP							√					√	
				Penilaian kinerja Individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment							√					√	
			2	Penerapan assesment untuk pertimbangan pengembangan karir dan mutasi pegawai	Data Mutasi											√	
					Data Promosi											√	
					Data Peserta Assesment											√	
			3	Penerapan Disiplin dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	Jumlah Pelanggaran tahun sebelumnya											√	
					Jumlah Pelanggaran tahun ini											√	
					Jumlah pelanggaran yang diberikan sanksi/hukuman											√	
			4	Perencanaan kebutuhan/penambahan jumlah pegawai baik ASN maupun Non ASN menggunakan Analisis Beban Kerja (ABK)	Tersedianya dokumen Analisis Beban Kerja	√											
			5	Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi	Adanya identifikasi kebutuhan kompetensi di lingkungan KPU Kabupaten Alor		√										
					Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi											√	
			6	Implementasi Standar Kompetensi Jabatan	Setiap jabatan sudah memiliki standar Kompetensi Jabatan	√											
			7	Pengisian Sistem Informasi Kepegawaian	Data kepegawaian yang mutakhir di lingkungan KPU Kabupaten Alor	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		2	Profesionalisme ASN	1	Pembangunan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	Jumlah dan jenis jabatan fungsional yang mendukung unit dan satuan kerja	√										
6	Penguatan Akuntabilitas	1	Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1	Penyusunan dan Penetapan Renstra	Renstra KPU Kabupaten Alor	√										
				2	Penetapan Kinerja dengan menerapkan <i>reward and punishment</i>	Adanya dokumen penetapan Kinerja hingga level Eselon IV	√										
						% Capaian Kinerja merupakan unsur pemberian <i>Reward and Punishment</i>	√										

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai	√												
			3	Penyelenggaraan anggaran yang efektif dan efisien	Adanya program dan Kegiatan: 1). Jumlah Program 2). Jumlah Kegiatan 3). Jumlah program yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi 4).Jumlah Kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi	√											
				Persentase Sasaran Kinerja: 1). Jumlah Sasaran Kinerja 2). Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih	√	√											
				Persentase Anggaran yang berhasil difocussing untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi: 1). Jumlah anggaran total 2). Jumlah anggaran yang berhasil difocussing												√	
			4	Pemanfaatan Aplikasi terintegrasi untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran	Adanya aplikasi terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			5	Pengukuran Capaian Kinerja	% Capaian Kinerja	√	√										
			6	Evaluasi Capaian Kinerja	Adanya rencana tindak lanjut dan pelaksanaan tindak lanjut atas evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Alor		√										
			7	Pelaporan Kinerja	Pelaporan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Alor tepat waktu		√										
		2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1	Permutakhiran data kinerja di aplikasi E-Lapkin; 2. Data e-Lapkin unit/satuan kerja termutakhir												√
				2	Pelatihan SDM pengelola Akuntabilitas Kinerja	% jumlah pegawai pengelola akuntabilitas kinerja yang memperoleh pelatihan											√
					Pengelola PPBJ bersertifikat												√
7	Pengawasan	1	Pembangunan Zona Integritas	1	Perencanaan Zona Integritas;		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				2	Penyusunan Rencana Aksi Zona Integritas		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			3 Pelaksanaan Rencana Aksi Zona Integritas	Dokumentasi kegiatan yang terlaksana dari 6 area Zona Integritas di dalam Rencana Aksi Zona Integritas		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				% Kegiatan yang di dalam Rencana Aksi Zona Integritas													√
			4 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pembangunan Zona Integritas	Dokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI													√
				% Pelaksanaan tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi atas rencana kerja pembangunan ZI													√
				Melaporkan pembangunan ZI dengan didasarkan pada rencana kerja yang sudah dilegalkan													√
			5 Pengisian Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE ZI)	Terisinya LKE ZI													√
		2 Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi KPU	1 Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)	Adanya UPG di lingkungan KPU Kabupaten Alor							√						√
			2 Pembanguna Komitmen dan Diseminasi atas peraturan gratifikasi	Adanya alat sosialisasi di lingkungan KPU Kabupaten Alor							√						
				Adanya sosialisasi gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Alor							√						
				Tanda tangan komitmen anti gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Alor							√						
			3 Public Campaign Anti Gratifikasi	Adanya alat sosialisasi anti gratifikasi kepada stakeholder eksternal	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			4 Monitoring, Evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tindak lanjut atas pelaksanaan sistem pengendalian gratifikasi	Laporan Pengendalian gratifikasi													√
				Tindak lanjut pengendalian gratifikasi yang sudah dilaksanakan													√
		3 Pelaksanaan Whistle Blowing System KPU	1 Pembangunan aplikasi Whistle Blowing System	1. Tersedianya alat WBS yang bisa diakses oleh publik													√
				2. Adanya SOP WBS													√
				3. Adanya Pengelola WBS													√
			2 Pengelolaan WBS	Prosentase pengaduan WBS selesai di tindaklanjuti													√
			3 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan WBS	Laporan Pengelolaan WBS													√

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4	Pelaksanaan Pemantauan benturan kepentingan KPU	1	Identifikasi benturan kepentingan di lingkungan KPU Kabupaten Alor	Potensi-potensi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dari pelaksanaan tugas dan fungsi		√													
			2	Penandatanganan Surat Pernyataan Benturan Kepentingan bagi anggota dan ASN yang memiliki potensi di lingkungan Unit/Satuan Kerja	% Penandatanganan surat pernyataan benturan kepentingan dari identifikasi benturan kepentingan;		√													
			3	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan tindak lanjut atas pengelolaan Benturan Kepentingan	Dokumen laporan monitoring evaluasi pengelolaan Benturan Kepentingan														√	
	5	Peningkatan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Alor	1	Pembangunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Alor	Adanya Tim SPIP KPU Kabupaten Alor		√													
			2	Pelaksanaan SPIP: 1). Lingkungan Pengendalian 2). Penilaian Risiko 3). Kegiatan Pengendalian 4). Informasi dan Komunikasi 5). Pemantauan Pengendalian Intern	Terselenggaranya: 1). Lingkungan Pengendalian 2). Penilaian Risiko 3). Kegiatan Pengendalian 4). Informasi dan Komunikasi 5). Pemantauan Pengendalian Intern			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
			3	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan SPIP	Pelaporan Buku Kendali tepat waktu			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	6	Penanganan Pengaduan Masyarakat KPU	1	Pembangunan Sistem Pengaduan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten Alor	Tersedianya sarana penyampaian pengaduan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
					Adanya pejabat yang mengelola pengaduan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
					Terdapat sistem mekanisme prosedur pengaduan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
					Terdapat jangka waktu penyelesaian pengaduan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			2	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten Alor	Prosentase pengaduan masyarakat selesai ditindaklanjuti														√	
	3	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan atas Pengaduan Masyarakat di lingkungan unit/satuan kerja	Laporan secara berkala hasil pengelolaan pengaduan yang telah dilakukan meliputi capaian, hambatan dan rekomendasi penanganan pengaduan masyarakat									√					√			
	7	Peningkatan Integritas Individu	1	Penyampaian LHKPN	100% seluruh wajib lapor LHKPN di lingkungan KPU Kabupaten Alor		√	√	√											
2			Penyampaian LHKASN	100% LHKASN di lingkungan KPU Kabupaten Alor		√	√	√												

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		8 Peningkatan Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa	1 Pembangunan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Adanya struktur pengelolaan Pengadaan Barang/jasa di lingkungan KPU Kabupaten Alor	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2 Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Prosentase pelaksanaan pengadaan sesuai perpres 16 tahun 2018	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			1 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan atas Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Laporan Pengadaan barang/jasa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
8	Pelayanan Publik	1 Penguatan pelayanan prima di lingkungan KPU Kabupaten Alor	1 Memetakan jenis-jenis/produk-produk pelayanan Administrasi Internal Kesekretariatan dan pelayanan eksternal (terkait pemilihan). Melakukan evaluasi terhadap jenis-jenis layanan baik internal dan eksternal terhadap komponen standar pelayanan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 Meliputi: 1). Dasar hukum 2). Persyaratan Layanan 3). Sistem, mekanisme dan prosedur layanan 4). Jangka waktu Penyelesaian layanan 5). Biaya/tarif 6). Produk Layanan 7). Saranm Prasarana dan/ atau fasilitas 8). Kompetensi Pelaksana 9). Pengawasan Internal 10). Pelayanan Pengaduan, saran dan masukan 11). Jumlah pelaksana 12). Jaminan Pelayanan 13). Jaminan Keamanan 14). Evaluasi Kerja Pelaksana Tools evaluasi menggunakan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Revormasi Birokrasi NOMOR 17 Tahun 2017	Informasi jenis-jenis atau produk-produk layanan di lingkungan KPU Kabupaten Alor baik kepada internal dan eksternal; 1). Pelaksanaan rekomendasi hasil evaluasi terhadap setiap jenis layanan internal dan eksternal /upaya pemenuhan terhadap 14 komponen standar pelayanan (reviu dan perbaikan standar pelayanan) 2). Sudah adanya maklumat pelayanan di lingkungan unit/satuan kerja 3). Indeks kepuasan layanan yang di dapat melalui survey pelayanan; 4). Jumlah sengketa 5). Menurunnya jumlah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu 6). Adanya akses pengaduan konsultasi serta pengelolaan dan pengaduan masyarakat (jumlah pengaduan masuk, sedang proses dan selesai) 7). Adanya inovasi pelayanan yang dirasakan manfaatnya oleh stakeholder internal dan/atau eksternal Penilaian Kinerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2	Mendorong Inovasi di sektor pelayanan kepemiluan dan administrasi di lingkungan KPU Kabupaten Alor	1	Menciptakan/Melakukan deregulasi pelayanan/menerapkan Inovasi yang mendorong perbaikan pelayanan dalam hal: 1) Kesesuaian Persyaratan 2) Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3) Kecepatan Waktu Penyelesaian 4) Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis/Berbayar 5) Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6) Kompetensi Pelaksana 7) Perilaku Petugas 8) Kualitas Sarana dan prasarana 9) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1) Indeks Kepuasan layanan yang di dapat melalui survei pelayanan; 2) Adanya regulasi/deregulasi kebijakan pelayanan; 3) Adanya SOP Pelayanan 4) Informasi kepada publik terkait biaya layanan 5) Informasi jenis-jenis pelayanan di lingkungan unit/satuan kerja baik kepada internal dan eksternal; 6) Tersedianya pelayanan berbasis teknologi informasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2	Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap inovasi layanan	Adanya rekomendasi dan tindak lanjut hasil evaluasi.												√		
						Dilaksanakannya rekomendasi hasil evaluasi												√		
		3	Pembangunan Zona Hijau Pelayanan		Membangun dan menerapkan variabel dan indikator Zona Hijau Pelayanan Publik: 1. Standar Pelayanan [Prasyarat layanan, Sistem Mekanisme Prosedur, Produk Layanan, Jangka waktu penyelesaian dan Biaya/tarif] 2. Maklumat pelayanan 3. Sistem informasi pelayanan Publik 4. Sarana Prasarana dan Fasilitas 5. Pelayanan Khusus [Ketersediaan sarana khusus bagi pengguna layanan kebutuhan khusus (ruang menyusui, jalur kursi roda, toilet khusus dll), Ketersediaan pelayanan khusus bagi pengguna layanan kebutuhan khusus] 6. Pengelolaan Pengaduan [Ketersediaan sarana pengaduan, Ketersediaan informasi prosedur dan tata cara penyampaian aduan, Ketersediaan pejabat/petugas pengelola aduan] 7. Penilaian Kinerja berupa sarana pengukuran kepuasan langganan dan survey pelayanan 8. Ketersediaan Visi, Misi dan Motto Pelayanan: 9. Atribut Pelayanan berupa kartu identitas petugas, kartu tamu, Buku Tamu dan Petunjuk arah ruang layanan 10. Pelayanan terpadu satu pintu	Tersedianya standar pelayanan sesuai amanat UU Tersedianya maklumat pelayanan Tersedianya sistem informasi pelayanan publik yang dapat diakses publik Tersedianya sarana prasarana dan fasilitas pelayanan yang layak Tersedianya pelayanan khusus berupa sarana layanan Tersedianya sarana pengaduan berikut prosedur, petugas dan dokumentasi pengaduan Tersedianya survey dan sarana pengukuran kinerja serta indeks hasil pengelolaan Tersedianya visi misi dan moto pelayanan Atribut layanan dapat terlihat publik Tersedianya pelayanan satu pintu di lingkungan unit/satuan kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
							√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
							√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
							√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
							√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
							√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
							√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4 Penerapan partisipasi publik dalam layanan publik	1 Pembangunan Kerja Sama	Presentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemilu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2 Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemilu		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		5 Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik	5 Pembangunan dan pelaksanaan reward and punishment dalam pelayanan internal dan eksternal	Adanya pemberian reward and punishment dalam pelayanan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY

